

# PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN

*Gross Regional Domestic Product by Expenditure*

## KOTA BEKASI 2010-2016





Katalog: 9302003.3275

# PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN

*Gross Regional Domestic Product by Expenditure*

KOTA BEKASI  
2010-2016

<https://bekasikota.bpt.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BEKASI**

# PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT PENGELUARAN

*Gross Regional Domestic Product by Expenditure*

## KOTA BEKASI 2010-2016

No. Publikasi : 32750.1703

Katalog BPS : 9302002.3275

Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm

Jumlah Halaman : xii + 56 Halaman

Naskah:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kota Bekasi

Gambar Kulit:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kota Bekasi

Diterbitkan Oleh:

Badan Pusat Statistik Kota Bekasi

*“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota Bekasi”*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat-Nya maka publikasi Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kota Bekasi 2010-2016 dapat diterbitkan.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran atau permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa sektor, yaitu Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga, Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumahtangga, Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto, Perubahan Inventori, Net Ekspor. Dalam publikasi ini ditampilkan tabel-tabel PDRB tahun 2010–2016 atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2010 dalam bentuk nilai nominal dan persentase.

Data-data yang digunakan untuk menyusun publikasi ini bersumber dari berbagai dinas dan instansi yang berada di Kota Bekasi serta survei khusus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi. Karena itu, pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada BPS Kota Bekasi sehingga memungkinkan terbitnya publikasi ini.

Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan publikasi ini. Semoga informasi yang disajikan dapat bermanfaat bagi semua pengguna data.

Bekasi, 20 September 2017

BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA BEKASI  
KEPALA,

Drs. Annazri  
NIP. 19620612 199003 1 003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR GRAFIK .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	viii
PENJELASAN TEKNIS .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto.....	1
1.2 Kegunaan Statistik PDRB .....	3
1.3 Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto .....	4
<b>BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA</b>	
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga .....	5
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT .....	8
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah .....	11
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto .....	14
2.5 Perubahan Inventori .....	18
2.6 Ekspor Impor .....	22
<b>BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA BEKASI 2010-2016</b>	
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Kota Bekasi Menurut Pengeluaran .....	25
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumahtangga .....	30
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT .....	34
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah .....	35
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto .....	38
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori .....	40
3.7 Perkembangan Net Ekspor .....	41
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>43</b>
<b>L A M P I R A N .....</b>	<b>45</b>

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Perbandingan PDRB adhb dan adhk 2010 Menurut Pengeluaran Kota Bekasi (Miliar Rupiah), 2010-2016 .....	27
Grafik 3.2 Laju Pertumbuhan Sub Komponen PMTB Kota Bekasi (Persen), 2011-2016 .....	39
Grafik 3.3 Perbandingan Perubahan Inventori adhb dan adhk 2010 Kota Bekasi (Miliar Rupiah), 2010-2016 .....	41

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Bekasi (Miliar Rupiah), 2010-2016 .....	26
Tabel 3.2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Bekasi (Miliar Rupiah), 2010-2016 .....	27
Tabel 3.3	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Bekasi (Persen), 2010-2016 .....	28
Tabel 3.4	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Bekasi (Persen), 2011-2016 .....	29
Tabel 3.5	Laju Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kota Bekasi, 2011-2016 .....	29
Tabel 3.6	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga Kota Bekasi, 2010-2016 .....	30
Tabel 3.7	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga Kota Bekasi (Persen), 2010-2016 .....	32
Tabel 3.8	Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga Kota Bekasi (Persen), 2011-2016 .....	33
Tabel 3.9	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga Kota Bekasi (Persen), 2011-2016 .....	34
Tabel 3.10	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT Kota Bekasi, 2010-2016 .....	34
Tabel 3.11	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Bekasi, 2010-2016 .....	36
Tabel 3.12	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Bekasi, 2010-2016 .....	37
Tabel 3.13	Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Bekasi, 2010-2016	39
Tabel 3.14	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Bekasi, 2010-2016 .....	40

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Kota Bekasi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Bekasi (Miliar Rupiah), 2010-2016 .....	47
Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Bekasi (Miliar Rupiah), 2010-2016 .....	48
Lampiran 3. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Bekasi (Persen), 2010-2016 .....	49
Lampiran 4. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Pengeluaran Kota Bekasi (Persen), 2010-2016 .....	50
Lampiran 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Bekasi (Persen), 2011-2016 .....	51
Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Bekasi (Persen), 2011-2016 .....	52
Lampiran 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Bekasi (2010 = 100), 2010-2016 .....	53
Lampiran 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Bekasi (2010 = 100), 2010-2016 .....	54
Lampiran 9. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kota Bekasi (2010=100), 2010-2016 .....	55
Lampiran 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kota Bekasi (2010=100), 2011-2016 .....	56



# PENJELASAN TEKNIS



<https://bekasikotops.go.id>

## PENJELASAN TEKNIS

1. Penghitungan statistik neraca nasional yang digunakan pada publikasi ini mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa yang dikenal sebagai “Sistem Neraca Nasional”. Namun, penerapan statistik neraca nasional tersebut telah disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi di Indonesia.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (kabupaten/kota) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu produksi dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen pengeluarannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.
3. Penyajian PDRB menurut pengeluaran dirinci menurut total pengeluaran dari seluruh sektor yang mencakup Konsumsi Akhir Rumah tangga; Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah tangga; Konsumsi Akhir Pemerintah; Pembentukan Modal Tetap Bruto; Perubahan Inventori; Ekspor dan Impor.
4. Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu. Dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian.

- 
- 
5. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.
  6. Harga Berlaku adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tahun sedang berjalan.
  7. Harga Konstan adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap di satu tahun dasar.
  8. Tahun Dasar adalah tahun terpilih sebagai referensi statistik, yang digunakan sebagai dasar penghitungan tahun-tahun yang lain. Dengan tahun dasar tersebut dapat digambarkan seri data dengan indikator rinci mengenai perubahan/pergerakan yang terjadi.





## 1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik

atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

# Bab I

## PENDAHULUAN

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, (2) Pertambangan dan Penggalian, (3) Industri Pengolahan, (4) Pengadaan Listrik dan Gas, (5) Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, (6) Konstruksi, (7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, (8) Transportasi dan Pergudangan, (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, (10) Informasi dan Komunikasi, (11) Jasa Keuangan dan Asuransi, (12) Real Estat, (13) Jasa Perusahaan, (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, (15) Jasa Pendidikan, (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, (17) Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

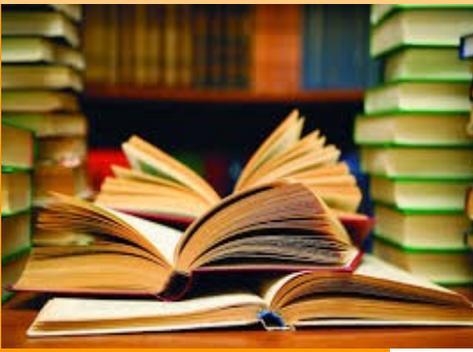
## **1.2 Kegunaan Statistik PDRB**

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan komunikasi konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.

7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

<https://bekasikota.bps.go.id>



# Bab II

## METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

### 2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga

#### i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB menurut pengeluaran. Disamping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

#### ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

#### iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of*

*Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furnitur, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka dalam penyajian publikasi ini 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumahtangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- ▶ Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);

Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumahtangga pemilik dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumahtangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

- ▶ Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- ▶ Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- ▶ Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumahtangga.
- Pengeluaran rumahtangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumahtangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumahtangga.

#### **iv. Penghitungan PKRT Tahunan**

##### **1. Sumber data**

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dari dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

##### **2. Metode penghitungan**

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian

(*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sebagai berikut:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
  - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
  - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Terhadap data poin ke-1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu
3. Data poin ke-2 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP
4. Diperoleh nilai PKRT atas dasar harga berlaku yang telah di-*adjust*
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota Bekasi dan 7 kelompok COICOP
6. PKRT atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke-4 dengan hasil poin ke-5.

## **2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT**

### **i. Pendahuluan**

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

### **ii. Konsep dan Definisi**

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga dan LNP yang

Melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

- ▶ LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- ▶ Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- ▶ Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- ▶ Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- ▶ Istilah nonprofit tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

### **iii. Cakupan**

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dan sebagainya.

- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dan sebagainya.

#### iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

##### 1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).  
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.  
Informasi yang diperoleh dari hasil up-dating direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

##### 2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut:

- a. Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus:

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

$\bar{x}_{ij}$  : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

$x_{ij}$  : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

$n_i$  : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

$i$  : Jenis lembaga LNPRT, = 1, 2, 3, ..., 7

$j$  : Jenis pengeluaran LNPRT, = 1, 2, 3, ..., 19

b. Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumus:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

$X$  : PK-LNPRT adh Berlaku

$N_i$  : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Dari hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (adhb). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (adhk) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT adhb dengan IHK tahun dasar 2010.

## 2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah

### i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

### ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PKP mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat

rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan:

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dan sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

### **iii. Cakupan**

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik provinsi, kabupaten/kota, maupun desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP) Kota Bekasi mencakup:

- a. PK-Pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- b. PK-Pemerintah provinsi yang berada di wilayah Kota Bekasi;
- c. PK-Pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah Kota Bekasi;
- d. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Kota Bekasi.

#### iv. Penghitungan PKP Tahunan

##### 1. Sumber data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PKP Kota Bekasi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementrian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

##### 2. Metode penghitungan

- a. PKP kabupaten/kota atas dasar harga berlaku (adhb)

Secara umum, PKP adhb dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PKP adhb} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa}$$

Output non-pasar dihitung dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu : Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yg dibeli dengan harga pasar ), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level kabupaten/kota, PKP adhb dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah kabupaten/kota itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah provinsi yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari kabupaten/kota yang bersangkutan.

- b. PKP kabupaten/kota atas dasar harga konstan (adhk)

Pengeluaran konsumsi pemerintah adhk dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

## 2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

### i. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

### ii. Konsep dan Definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa didalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

### iii. Cakupan

PMTB terdiri dari :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

### iv. Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data
  - a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS kabupaten/kota.
  - b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
  - c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga.
  - d. Laporan keuangan perusahaan.
  - e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang.
  - f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
  - g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
  - h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
  - i. Publikasi Statistik Konstruksi.
  - j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
  - k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

## 2. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “*supply*” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

### Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, didalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor didalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adhb atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adhk maka PMTB adhb tersebut di “*deflate*” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

### Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian diantaranya dialokasikan menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output

industri konstruksi, baik adhb maupun adhk.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adhb. Untuk memperoleh nilai adhk Konstan adalah dengan mendeflate PMTB (adhb) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan kedua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB adhk dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adhk terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adhb, nilai PMTB adhk tersebut di “*inflate*” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adhk di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara. Pertama, PMTB adhb diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). Kedua, untuk memperoleh PMTB adhk adalah dengan cara men“*deflate*” PMTB adhb dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adhb untuk barang modal tak berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adhb dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adhk diperoleh dengan mendeflate nilai adhb dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi

dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adhb diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang *software*. Untuk adhk diperoleh dengan mendeflate nilai adhb dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adhk diperoleh dengan cara mendeflate nilai adhb dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

## 2.5 Perubahan Inventori

### i. Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

## ii. Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

## iii. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;

- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

#### **iv. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan**

##### **1. Sumber data**

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh website Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id));
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

##### **2. Metode penghitungan**

Terdapat 2 (dua) metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”,

sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi komoditas.

Di lihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

### Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adhb, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- Menghitung posisi inventori adhk dengan cara mendeflate stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- Menghitung perubahan inventori adhk dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- Menghitung perubahan inventori adhb dengan menginflate perubahan inventori adhk dengan IHPB rata-rata tahunan.

### Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adhb diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adhk dihitung dengan: a. mendeflate nilai perubahan inventori adhb dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

## 2.6 Ekspor Impor

### i. Pendahuluan

Aktivitas ekspor impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

### ii. Konsep dan Definisi

Ekspor impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

### iii. Cakupan

Ekspor impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari kabupaten/kota tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari kabupaten/kota tersebut
- c. Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- d. Net Ekspor antar daerah
- e. Ekspor antar daerah
- f. Impor antar daerah

### iv. Penghitungan Ekspor Impor Tahunan

1. Sumber data
  - a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
  - b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
  - c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
  - d. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
  - e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
  - f. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

#### 2. Metode penghitungan

Ekspor impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board (fob)* dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.





Perubahan struktur ekonomi Kota Bekasi akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2010 sampai dengan 2016 tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional maupun antar wilayah.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah Kota Bekasi digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

### **3.1 Tinjauan Agregat PDRB Kota Bekasi menurut Pengeluaran**

Kondisi perekonomian Kota Bekasi menunjukkan tanda pemulihan setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif.

## **Bab III**

### **TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA BEKASI BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN KOTA BEKASI 2010-2016**



Berdasarkan tabel 3.1, nilai PDRB Kota Bekasi atas dasar harga berlaku selama periode tahun 2010-2016 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Tercatat pada tahun 2010 PDRB Kota Bekasi sebesar Rp. 41,28 trilyun, lalu meningkat hingga Rp. 76,81 trilyun di tahun 2016.

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan 2010. Melalui pendekatan penghitungan atas dasar harga konstan 2010, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume/kuantitas. PDRB komponen pengeluaran atas dasar harga konstan merupakan suatu gambaran perubahan ekonomi riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan dari volume konsumsi akhir.

Sama halnya dengan PDRB adhb, nilai PDRB adhk 2010 juga menunjukkan adanya peningkatan. Selama kurun waktu 2010–2016, PDRB adhk meningkat dari Rp. 41,28 trilyun menjadi Rp. 58,83 trilyun.

“PDRB Kota Bekasi menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun”

**Tabel 3.1**  
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Bekasi (Miliar Rupiah), 2010-2016**

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Konsumsi Rumah tangga	53.351,24	57.604,81	63.112,62	68.957,92	75.473,09	82.711,85	89.426,44
2. Konsumsi LNPRT	165,92	173,39	178,63	205,38	230,24	222,50	235,05
3. Konsumsi Pemerintah	2.026,24	2.256,62	2.544,83	2.760,47	3.082,73	3.528,75	3.792,68
4. PMTB	11.669,68	13.223,76	15.540,35	18.095,72	21.370,97	23.943,14	26.169,28
5. Perubahan Inventori	2.441,06	2.532,43	4.288,53	2.961,76	3.892,10	3.674,54	3.786,89
6. Net Ekspor	-28.370,65	-29.651,68	-33.965,74	-35.266,25	-39.939,78	-43.294,57	-46.596,65
<b>Total PDRB</b>	<b>41.283,49</b>	<b>46.139,34</b>	<b>51.699,22</b>	<b>57.715,00</b>	<b>64.109,36</b>	<b>70.786,22</b>	<b>76.813,70</b>

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

**Tabel 3.2**  
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,**  
**Kota Bekasi (Miliar Rupiah), 2010-2016**

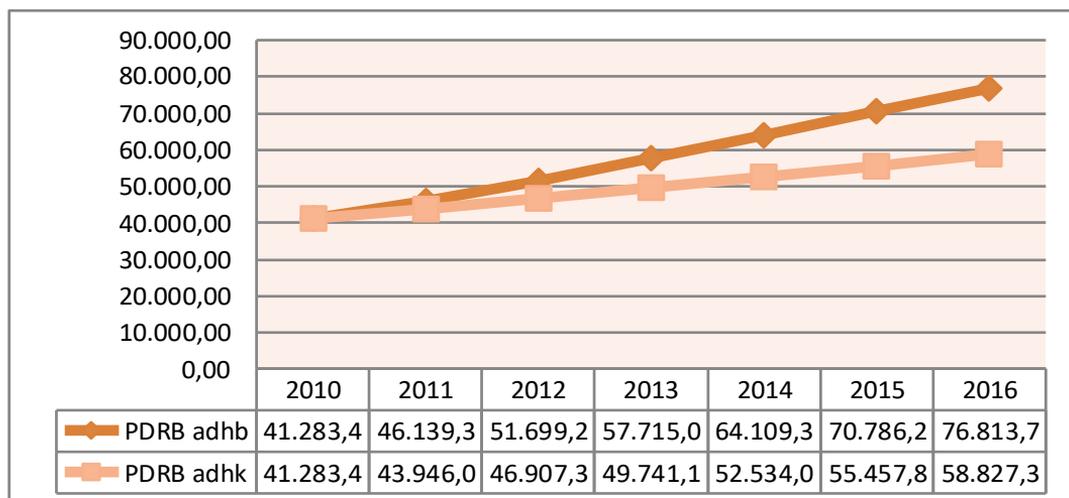
Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Konsumsi Rumah tangga	53.351,24	55.386,11	58.241,53	60.212,08	62.040,16	64.834,22	68.175,06
2. Konsumsi LNPRT	165,92	169,60	169,74	179,23	192,06	180,18	182,35
3. Konsumsi Pemerintah	2.026,24	2.070,89	2.146,06	2.166,93	2.256,11	2.372,34	2.439,29
4. PMTB	11.669,68	12.843,47	14.230,39	15.320,29	16.914,64	18.172,03	19.440,78
5. Perubahan Inventori	2.441,06	2.441,20	3.970,69	2.643,16	2.624,36	2.172,61	2.256,49
6. Net Ekspor	-28.370,65	-28.965,19	-31.851,07	-30.780,57	-31.493,23	-32.273,57	-33.666,63
<b>Total PDRB</b>	<b>41.283,49</b>	<b>43.946,08</b>	<b>46.907,33</b>	<b>49.741,13</b>	<b>52.534,09</b>	<b>55.457,81</b>	<b>58.827,35</b>

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Dari grafik 3.1, nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB adhb selalu lebih besar dari nilai PDRB adhk 2010. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adhb. Sedangkan dalam perhitungan PDRB adhk 2010 pengaruh faktor harga telah ditiadakan. Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan net ekspor (E) atau ekspor dikurangi impor.

**Grafik 3.1**  
**Perbandingan PDRB adhb dan adhk 2010 Menurut Pengeluaran,**  
**Kota Bekasi (Miliar Rupiah), 2010-2016**



**Tabel 3.3**  
**Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran,**  
**Kota Bekasi (Persen), 2010-2016**

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Konsumsi Rumah tangga	129,23	124,85	122,08	119,48	117,73	116,85	116,42
2. Konsumsi LNPRT	0,40	0,38	0,35	0,36	0,36	0,31	0,31
3. Konsumsi Pemerintah	4,91	4,89	4,92	4,78	4,81	4,99	4,94
4. PMTB	28,27	28,66	30,06	31,35	33,34	33,82	34,07
5. Perubahan Inventori	5,91	5,49	8,30	5,13	6,07	5,19	4,93
6. Net Ekspor	-68,72	-64,27	-65,70	-61,10	-62,30	-61,16	-60,66
<b>Total PDRB</b>	<b>100,00</b>						

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Berdasarkan tabel 3.3 terlihat bahwa selama periode 2010–2016, kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga melebihi total produksi di wilayah Kota Bekasi. Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mencapai 116 persen sampai dengan 129 persen. Sehingga untuk kegiatan ekspor impor di Kota Bekasi yang tercatat merupakan net impor dengan kisaran 61 persen sampai dengan 68 persen. Hal ini menunjukkan bahwa nilai impor di Kota Bekasi lebih besar dibandingkan dengan nilai ekspor meskipun kecenderungan perdagangan internasional dalam periode tersebut menunjukkan posisi surplus.

Di sisi lain, pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 28 persen sampai dengan 34 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah sekitar 4 persen sampai dengan 5 persen dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar.

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi tahun 2011-2016 cenderung mengalami perlambatan. Seperti yang tertera di tabel 3.4, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yakni sebesar 6,74 persen, sebaliknya terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 5,57 persen.

**Tabel 3.4**  
**Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,**  
**Kota Bekasi (Persen), 2011-2016**

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
1	2	3	4	5	6	7
1. Konsumsi Rumah tangga	3,81	5,16	3,38	3,04	4,50	5,15
2. Konsumsi LNPRT	2,22	0,08	5,59	7,16	-6,18	1,20
3. Konsumsi Pemerintah	2,20	3,63	0,97	4,12	5,15	2,82
4. PMTB	10,06	10,80	7,66	10,41	7,43	6,98
5. Perubahan Inventori						
6. Net (Ekspor Impor)						
<b>Total PDRB</b>	<b>6,45</b>	<b>6,74</b>	<b>6,04</b>	<b>5,61</b>	<b>5,57</b>	<b>6,08</b>

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Sementara itu, laju indeks implisit PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan. Hal tersebut ditunjukkan dalam tabel 3.5.

**Tabel 3.5**  
**Laju Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran,**  
**Kota Bekasi, 2011-2016**

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
1	2	3	4	5	6	7
1. Konsumsi Rumah tangga	4,01	4,19	5,69	6,22	4,87	2,82
2. Konsumsi LNPRT	2,23	2,94	8,88	4,62	3,01	4,39
3. Konsumsi Pemerintah	8,97	8,82	7,43	7,26	8,86	4,53
4. PMTB	2,96	6,06	8,16	6,97	4,28	2,16
5. Perubahan Inventori						
6. Net (Ekspor Impor)						
<b>Total PDRB</b>	<b>4,99</b>	<b>4,98</b>	<b>5,28</b>	<b>5,17</b>	<b>4,59</b>	<b>2,30</b>

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

### 3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumahtangga

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 3.6**  
**Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga**  
**Kota Bekasi, 2010-2016**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Total Konsumsi Rumahtangga</b>							
a. Adhb (miliar Rupiah)	53.351,24	57.604,81	63.112,62	68.957,92	75.473,09	82.711,85	89.426,44
b. Adhk 2010 (miliar Rupiah)	53.351,24	55.386,11	58.241,53	60.212,08	62.040,16	64.834,22	68.175,06
Proporsi terhadap PDRB (% adhb)	129,23	124,85	122,08	119,48	117,73	116,85	116,42
<b>Rata-rata Konsumsi Per Rumahtangga/ Tahun</b>							
a. Adhb (ribu Rupiah)	84.591,05	89.459,86	95.555,69	102.730,45	110.555,26	119.848,97	121.290,40
b. Adhk 2010 (ribu Rupiah)	84.591,05	86.014,24	88.180,61	89.701,30	90.878,29	93.944,40	92.466,84
<b>Rata-rata Konsumsi Per Kapita/ Tahun</b>							
a. Adhb (ribu Rupiah)	22.644,84	23.734,99	25.255,15	26.831,88	28.555,84	30.464,77	32.086,99
b. Adhk 2010 (ribu Rupiah)	22.644,84	22.820,81	23.305,93	23.428,83	23.473,38	23.880,01	24.461,81
<b>Pertumbuhan</b>							
a. Total Konsumsi Rumahtangga	-	3,81	5,16	3,38	3,04	4,50	5,15
b. Per Rumahtangga	-	1,68	2,52	1,72	1,31	3,37	-1,57
c. Per Kapita	-	0,78	2,13	0,53	0,19	1,73	2,44
Jumlah Rumahtangga (RT)	630.696	643.918	660.480	671.251	682.673	690.134	737.292
Jumlah Penduduk (000 orang)	2.356	2.427	2.499	2.570	2.643	2.715	2.787

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Berdasarkan tabel 3.6, tercermin bahwa dalam kurun waktu 2010–2016 konsumsi akhir rumahtangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (adhb) maupun riil (adhk 2010), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumahtangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumahtangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Porsi pengeluaran konsumsi rumahtangga terhadap PDRB pada periode tahun 2010-2016 cenderung mengalami penurunan. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu 129,23 persen dan terendah terjadi pada tahun 2016, yaitu 116,42 persen.

Pada tahun 2010, secara umum setiap rumahtangga di Kota Bekasi menghabiskan dana sekitar Rp. 84,59 juta setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dan sebagainya). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi Rp. 89,46 pada tahun 2011; Rp. 95,56 juta pada tahun 2012; Rp. 102,73 juta pada tahun 2013; Rp. 110,56 juta pada tahun 2014; Rp. 119,85 juta pada tahun 2015; dan Rp. 121,29 pada tahun 2016.

Sementara itu, berdasarkan PDRB adhk 2010, rata-rata konsumsi rumahtangga per rumahtangga selama periode 2010-2016 tumbuh pada kisaran 1 - 3 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 3,63 persen. Di sisi lain, rata-rata pertumbuhan konsumsi per kapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Peningkatan rata-rata konsumsi per kapita secara "riil" berkisar antara 0 - 2 persen. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumahtangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumahtangga adhk 2010 sebesar 3,81 persen pada tahun 2011. Kemudian, mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar 5,16 persen. Selanjutnya konsumsi rumahtangga tumbuh melambat di tahun 2013 dan 2014 masing-masing sebesar 0,53 persen dan 0,19 persen. Pada tahun 2015 dan 2016 terjadi kembali pada pertumbuhan konsumsi rumahtangga sebesar 1,73 persen dan 2,44 persen.

Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, kontribusi konsumsi bukan makanan terhadap total konsumsi di Kota Bekasi lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan selama periode tersebut cenderung berada di atas 20 persen.

**Tabel 3.7**  
**Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga**  
**Kota Bekasi (persen), 2010-2016**

Kelompok Konsumsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
1	2	3	4	5	6	7	8
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	20,74	21,16	22,22	22,86	24,38	25,02	26,20
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,55	3,53	3,40	3,60	3,46	3,56	3,57
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumahtangga	13,44	13,26	13,02	13,13	12,94	13,43	13,76
d. Kesehatan & Pendidikan	3,79	3,74	3,75	3,83	3,74	3,71	3,67
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	35,35	35,73	35,50	35,49	35,39	35,10	34,16
f. Hotel dan Restoran	18,72	18,22	17,69	16,78	15,92	14,85	14,43
g. Lainnya	4,41	4,36	4,41	4,32	4,17	4,34	4,22
<b>Total Konsumsi</b>	<b>100,00</b>						

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Pola proporsi konsumsi di atas menunjukkan pergeseran yang relatif kecil antara kebutuhan rumahtangga atas makanan dan non makanan. Walaupun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

**Tabel 3.8**  
**Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga**  
**Kota Bekasi (persen), 2011-2016**

Kelompok Konsumsi	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
1	2	3	4	5	6	7
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,05	6,64	2,63	5,88	5,41	5,53
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,43	4,55	8,97	3,17	5,29	4,89
c. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumahtangga	3,45	3,25	3,61	2,92	5,18	6,52
d. Kesehatan & Pendidikan	4,07	5,15	6,26	3,30	6,49	4,22
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	4,20	5,99	3,54	2,94	4,22	4,93
f. Hotel dan Restoran	3,05	3,81	2,56	(0,01)	2,17	4,97
g. Lainnya	3,24	3,37	1,45	2,89	7,42	2,72
<b>Total Konsumsi</b>	<b>3,81</b>	<b>5,16</b>	<b>3,38</b>	<b>3,04</b>	<b>4,50</b>	<b>5,15</b>

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumahtangga untuk kelompok makanan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan hingga 5,16 persen, sedangkan tahun 2013 dan tahun 2014 mengalami perlambatan dengan nilainya sebesar 3,38 persen dan 3,04 persen. Pertumbuhan konsumsi tahun 2015 dan 2016 kembali mengalami percepatan. Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumahtangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu sehingga ada indikasi terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam tabel 3.9, menunjukkan secara umum peningkatan setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi. Peningkatan harga secara umum pada kelompok konsumsi rumahtangga tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 4,89 persen. Kontribusi terbesar pada kenaikan harga di tahun tersebut disumbangkan oleh makanan, minuman dan rokok dengan pertumbuhan indeks implisit sebesar 7,43 persen. Sedangkan kenaikan harga terendah terjadi pada tahun 2012 sebesar 3,37 persen.

**Tabel 3.9**  
**Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga**  
**Kota Bekasi (persen), 2011-2016**

Kelompok Konsumsi	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
1	2	3	4	5	6	7
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	5,83	7,92	9,50	10,27	6,67	7,31
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,82	1,13	5,99	2,06	6,92	3,43
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumahtangga	2,99	4,12	6,40	4,78	8,15	3,97
d. Kesehatan & Pendidikan	2,18	4,65	4,88	3,48	2,11	2,54
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	4,74	2,69	5,50	6,01	4,30	0,29
f. Hotel dan Restoran	2,01	2,48	1,01	3,90	0,01	0,08
g. Lainnya	3,53	7,27	5,39	2,65	6,31	2,19
<b>Total Konsumsi</b>	<b>4,01</b>	<b>4,19</b>	<b>5,69</b>	<b>6,22</b>	<b>4,87</b>	<b>2,82</b>

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

### 3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Untuk itu peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi. Tabel 3.10 menunjukkan proporsi konsumsi LNPRT terhadap PDRB.

**Tabel 3.10**  
**Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT**  
**Kota Bekasi, 2010-2016**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014*	2015**	2016**
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Total Konsumsi LNPRT</b>							
a. Adhb (miliar Rupiah)	165,92	173,39	178,63	205,38	230,24	222,50	235,05
b. Adhk 2010 (miliar Rupiah)	165,92	169,60	169,74	179,23	192,06	180,18	182,35
Proporsi terhadap PDRB (% adhb)	0,40	0,38	0,35	0,36	0,36	0,31	0,31
Pertumbuhan (% adhk)		2,22	0,08	5,59	7,16	-6,18	1,20

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Berdasarkan tabel 3.10, terlihat bahwa pengeluaran konsumsi LNPRT pada periode 2010-2016 mengalami peningkatan dengan proporsi 0,31 persen sampai dengan 0,40 persen terhadap PDRB Kota Bekasi. Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi pertumbuhan konsumsi LNPRT adalah pemilihan kepala daerah.

Bila dilihat dari pendapatan riil, maka konsumsi LNPRT adhk pada tahun 2011 sebesar Rp. 169,60 miliar atau tumbuh sebesar 2,22 persen dari tahun 2010. Pada tahun 2012, konsumsi LNPRT mengalami perlambatan dengan nilai riil sebesar Rp. 169,74 miliar. Pada tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar 5,59 persen, kemudian meningkat hingga mencapai 7,16 persen di tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015 konsumsi LNPRT mengalami penurunan sebesar 6,18 persen. Namun di tahun 2016 kembali mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,20 persen.

### **3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah**

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumahtangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian di satu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kota Bekasi serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk adhb maupun adhk 2010. Pada tahun 2010 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adhb sebesar Rp. 2,03 trilyun, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2016 nilainya mencapai Rp. 3,79 trilyun. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah adhk 2010, yang juga mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2010 konsumsi pemerintah per kapita adhb sebesar Rp. 860,04 ribu, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya (lihat tabel 3.11).

**Tabel 3.11**  
**Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah**  
**Kota Bekasi, 2010-2016**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Total Konsumsi Pemerintah</b>							
a. Adhb (miliar Rupiah)	2.026,24	2.256,62	2.544,83	2.760,47	3.082,73	3.528,75	3.792,68
b. Adhk 2010 (miliar Rupiah)	2.026,24	2.070,89	2.146,06	2.166,93	2.256,11	2.372,34	2.439,29
Proporsi terhadap PDRB	4,91	4,89	4,92	4,78	4,81	4,99	4,94
<b>Konsumsi Pemerintah Per Kapita</b>							
a. Adhb (ribu Rupiah)	860,04	929,80	1.018,34	1.074,11	1.166,38	1.299,72	1.360,85
b. Adhk 2010 (ribu Rupiah)	860,04	853,27	858,77	843,16	853,62	873,79	875,24
<b>Konsumsi Pemerintah Per Pegawai Pemerintah</b>							
a. Adhb (ribu Rupiah)	150.829,60	168.505,24	193.921,18	216.830,83	242.467,54	272.700,97	302.157,59
b. Adhk 2010 (ribu Rupiah)	150.829,60	154.636,42	163.534,39	170.209,24	177.450,60	183.333,59	194.334,96
<b>Pertumbuhan (%)</b>							
a. Total Konsumsi Pemerintah	-	2,20	3,63	0,97	4,12	5,15	2,82
b. Per Kapita	-	(0,79)	0,64	(1,82)	1,24	2,36	0,17
c. Per Pegawai	-	2,52	5,75	4,08	4,25	3,32	6,00
Jumlah Pegawai Pemerintah	13.434	13.392	13.123	12.731	12.714	12.940	12.552
Jumlah Penduduk (000 orang)	2.356	2.427	2.499	2.570	2.643	2.715	2.787

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Rata-rata konsumsi pemerintah per kapita adhk 2010 menunjukkan angka yang berfluktuatif namun cenderung meningkat. Peningkatan yang terjadi mengidentifikasi adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Perkembangan konsumsi pemerintah per kapita dapat dilihat dari laju pertumbuhannya yang positif sebesar 0,64 persen pada tahun 2012; 1,24 persen pada tahun 2014, 2,36 persen pada tahun 2015 dan meningkat 0,17 persen pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2011 dan 2013 pertumbuhannya negatif atau mengalami penurunan sebesar 0,79 persen dan 1,82 persen.

Rata-rata konsumsi per pegawai pemerintah selama periode 2010-2016 menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Lain halnya dengan jumlah pegawai pemerintah Kota Bekasi yang terus mengalami penurunan dari 13.432 orang pada tahun 2010 menjadi 12.552 orang pada tahun 2016.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” menunjukkan seberapa besar pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah sebesar 5,15 persen, konsumsi pemerintah per kapita sebesar 2,36 persen dan konsumsi pemerintah per pegawai sebesar 3,32 persen. Untuk konsumsi pemerintah per pegawai, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 6,00 persen.

**Tabel 3.12**  
**Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah**  
**Kota Bekasi, 2010-2016**

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Struktur Konsumsi Akhir Pemerintah</b>							
a. Konsumsi Kolektif (miliar Rupiah)	1.221,62	1.361,51	1.528,34	1.707,60	1.914,64	2.155,45	2.299,76
(%)	60,29	60,33	60,06	61,86	62,11	61,08	60,64
b. Konsumsi Individu (miliar Rupiah)	804,62	895,11	1.016,48	1.052,87	1.168,10	1.373,30	1.492,92
(%)	39,71	39,67	39,94	38,14	37,89	38,92	39,36
Total Konsumsi (miliar Rupiah)	2.026,24	2.256,62	2.544,83	2.760,47	3.082,73	3.528,75	3.792,68
(%)	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Pertumbuhan Riil adhk 2010 (%)</b>							
a. Konsumsi Kolektif	-	1,40	4,25	4,49	3,90	1,54	1,45
b. Konsumsi Individu	-	3,42	2,70	-4,34	4,47	11,08	4,88
Total Konsumsi	-	2,20	3,63	0,97	4,12	5,15	2,82
<b>Pertumbuhan Indeks Implisit (%)</b>							
a. Konsumsi Kolektif	-	9,91	7,68	6,93	7,92	10,87	5,17
b. Konsumsi Individu	-	7,57	10,57	8,28	6,19	5,84	3,65
Total Konsumsi	-	8,97	8,82	7,43	7,26	8,86	4,53

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Secara struktur, bagian terbesar dari pengeluaran pemerintah adalah untuk konsumsi kolektif dengan besaran sekitar 60-62 persen. Secara nominal, pengeluaran ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Konsumsi individu secara nominal berfluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 nilai konsumsi individu sebesar Rp. 804,62 miliar atau 39,71 persen terhadap total konsumsi akhir pemerintah Kota Bekasi. Pada tahun 2016 proporsinya menurun menjadi 39,36 persen atau senilai Rp. 1,49 triliun.

Hal lain yang patut dicermati adalah perbandingan antara jumlah pegawai pemerintah dengan jumlah penduduk. Data pada tabel 3.11 menunjukkan bahwa jumlah pegawai pemerintah mengalami penurunan dari 13.434 orang pada tahun 2010 menjadi 12.552 orang pada tahun 2016. Sementara jumlah penduduk terus meningkat dari 2,36 juta orang pada tahun 2010 menjadi 2,79 juta orang pada tahun 2016.

### **3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto**

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Selain itu dapat juga diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRP maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Tabel 3.13 menjelaskan bahwa pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu tahun 2010-2016 berfluktuasi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yang mencapai besaran hingga 11,06 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 7,97 persen.

Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen bervariasi antar tahunnya. Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap. Sedangkan proporsi non bangunan selama tahun 2011-2015 berada pada kisaran 11-21 persen.

**Tabel 3.13**  
**Perkembangan dan Struktur PMTB**  
**Kota Bekasi, 2010-2016**

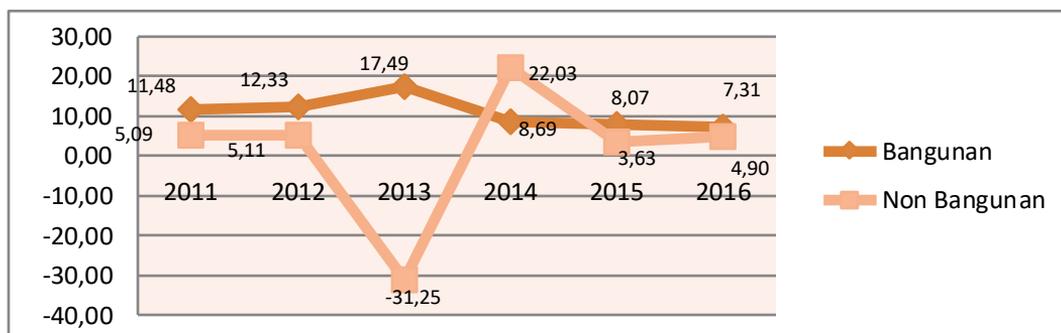
Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Total PMTB</b>							
a. Adhb (miliar Rupiah)	11.669,68	13.223,76	15.540,35	18.095,72	21.370,97	23.943,14	26.169,28
b. Adhk 2010 (miliar Rupiah)	11.669,68	12.843,47	14.230,39	15.320,29	16.914,64	18.172,03	19.440,78
Proporsi terhadap PDRB (% adhb)	28,27	28,66	30,06	31,35	33,34	33,82	34,07
<b>Struktur PMTB</b>							
a. Bangunan (miliar Rupiah)	9.071,48	10.426,59	12.295,85	15.821,06	18.313,73	20.639,54	22.369,92
(%)	77,74	78,85	79,12	87,43	85,69	86,20	85,48
b. Non Bangunan (miliar Rupiah)	2.598,19	2.797,17	3.244,50	2.274,67	3.057,24	3.303,60	3.799,37
(%)	22,26	21,15	20,88	12,57	14,31	13,80	14,52
Total Konsumsi (miliar Rupiah)	11.669,68	13.223,76	15.540,35	18.095,72	21.370,97	23.943,14	26.169,28
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Pertumbuhan (%)</b>							
a. Bangunan	-	11,48	12,33	17,49	8,69	8,07	7,31
b. Non Bangunan	-	5,09	5,11	-31,25	22,03	3,63	4,90
Total PMTB	-	10,06	10,80	7,66	10,41	7,43	6,98

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Pertumbuhan “riil” sub komponen bangunan pada tahun 2011 sebesar 11,48 persen. Pada tahun berikutnya pertumbuhannya mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 12,33 persen. Sampai dengan tahun 2016 sub komponen ini mampu tumbuh hingga mencapai 7,31 persen.

**Grafik 3.2**  
**Laju Pertumbuhan Sub Komponen PMTB,**  
**Kota Bekasi (Persen), 2011-2016**



### 3.6 Perkembangan Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Komponen perubahan inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi.

**Tabel 3.14**  
**Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori**  
**Kota Bekasi, 2010-2016**

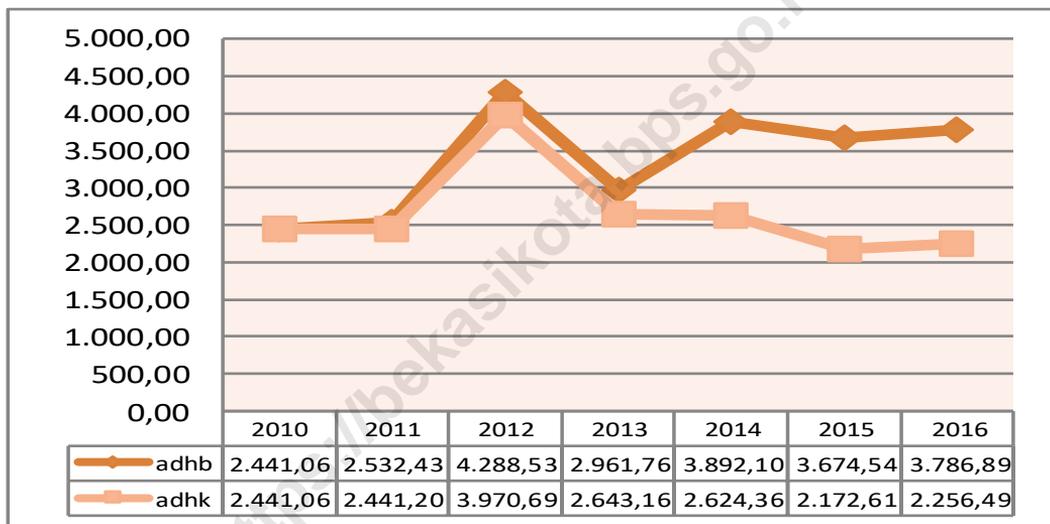
Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Total Nilai Inventori</b>							
a. Adhb (miliar Rupiah)	2.441,06	2.532,43	4.288,53	2.961,76	3.892,10	3.674,54	3.786,89
b. Adhk 2010 (miliar Rupiah)	2.441,06	2.441,20	3.970,69	2.643,16	2.624,36	2.172,61	2.256,49
Proporsi terhadap PDRB (% adhb)	5,91	5,49	8,30	5,13	6,07	5,19	4,93

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Pada tahun 2010 nilai perubahan inventori sebesar Rp. 2,44 trilyun atau menyumbang sebesar 5,91 persen terhadap pembentukan PDRB Kota Bekasi. Sedangkan tahun 2011-2016 proporsinya berada di kisaran 4-6 persen. Grafik 3.3 menggambarkan perubahan inventori ADHB dan ADHK 2010 pada tahun 2010 hingga tahun 2016.

**Grafik 3.3**  
**Perbandingan Perubahan Inventori adhb dan adhk 2010,**  
**Kota Bekasi (Miliar Rupiah), 2010-2016**



### 3.7 Perkembangan Net Ekspor

Net ekspor didefinisikan sebagai ekspor dikurangi impor. Pada penghitungan ekspor dan impor tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor impor (dalam series PDRB adhk 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “positif” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor menjadi nilai ekspor dan nilai impor dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode *cross hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

# Bab IV

## PENUTUP

Setelah melihat hasil analisis sederhana yang diuraikan pada bab 3 dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal berkaitan dengan PDRB menurut pengeluaran Kota Bekasi tahun 2010-2016 yaitu:

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2010-2016 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Bekasi pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku pengeluaran barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumahtangga, LNPRT (lembaga non-profit yang melayani rumahtangga), pemerintah dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis yang didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumahtangga dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.

3. Data disajikan dalam bentuk *series* data dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, sehingga mudah menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dan sebagainya) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.

4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.



# LAMPIRAN



<https://bekasikota.bps.go.id>



**Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Bekasi (Miliar Rupiah),  
2010–2016**

Komponen Pengeluaran		2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
1	2	3	4	5	6	7	8	
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	53.351,24	57.604,81	63.112,62	68.957,92	75.473,09	82.711,85	89.426,44	
a. Makanan, Minuman dan Rokok	11.066,96	12.187,04	14.025,35	15.761,24	18.402,48	20.690,54	23.429,62	
b. Pakaian dan Alas Kaki	1.892,27	2.031,95	2.148,40	2.481,40	2.612,79	2.941,38	3.190,95	
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah tangga	7.171,20	7.640,67	8.214,33	9.055,68	9.765,76	11.108,62	12.303,58	
d. Kesehatan dan Pendidikan	2.024,46	2.152,68	2.368,79	2.639,69	2.821,73	3.068,16	3.278,81	
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	18.860,06	20.583,45	22.403,12	24.473,24	26.706,67	29.031,04	30.552,17	
f. Hotel dan Restoran	9.985,85	10.496,92	11.167,19	11.568,54	12.018,22	12.280,05	12.900,68	
g. Lainnya	2.350,44	2.512,10	2.785,45	2.978,14	3.145,45	3.592,05	3.770,63	
Pengeluaran Konsumsi LNPR	165,92	173,39	178,63	205,38	230,24	222,50	235,05	
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.026,24	2.256,62	2.544,83	2.760,47	3.082,73	3.528,75	3.792,68	
Pembentukan Modal Tetap Bruto	11.669,68	13.223,76	15.540,35	18.095,72	21.370,97	23.943,14	26.169,28	
Perubahan Inventori	2.441,06	2.532,43	4.288,53	2.961,76	3.892,10	3.674,54	3.786,89	
Net Ekspor	-28.370,65	-29.651,68	-33.965,74	-35.266,25	-39.939,78	-43.294,57	-46.596,65	
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>41.283,49</b>	<b>46.139,34</b>	<b>51.699,22</b>	<b>57.715,00</b>	<b>64.109,36</b>	<b>70.786,22</b>	<b>76.813,70</b>	

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Bekasi (Miliar Rupiah), 2010–2016

Komponen Pengeluaran	2010–2016							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	53.351,24	55.386,11	58.241,53	60.212,08	62.040,16	64.834,22	68.175,06	
a. Makanan, Minuman dan Rokok	11.066,96	11.515,51	12.280,39	12.603,24	13.344,80	14.066,41	14.844,06	
b. Pakaian dan Alas Kaki	1.892,27	1.976,13	2.065,99	2.251,39	2.322,65	2.445,49	2.565,04	
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah tangga	7.171,20	7.418,91	7.660,33	7.936,68	8.168,32	8.591,30	9.151,78	
d. Kesehatan dan Pendidikan	2.024,46	2.106,78	2.215,22	2.353,79	2.431,38	2.589,17	2.698,49	
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	18.860,06	19.652,37	20.828,84	21.566,43	22.199,78	23.136,46	24.277,44	
f. Hotel dan Restoran	9.985,85	10.289,94	10.682,49	10.955,99	10.955,04	11.193,05	11.749,44	
g. Lainnya	2.350,44	2.426,49	2.508,27	2.544,57	2.618,19	2.812,35	2.888,81	
Pengeluaran Konsumsi LNPR	165,92	169,60	169,74	179,23	192,06	180,18	182,35	
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.026,24	2.070,89	2.146,06	2.166,93	2.256,11	2.372,34	2.439,29	
Pembentukan Modal Tetap Bruto	11.669,68	12.843,47	14.230,39	15.320,29	16.914,64	18.172,03	19.440,78	
Perubahan Inventori	2.441,06	2.441,20	3.970,69	2.643,16	2.624,36	2.172,61	2.256,49	
Net Ekspor	-28.370,65	-28.965,19	-31.851,07	-30.780,57	-31.493,23	-32.273,57	-33.666,63	
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>41.283,49</b>	<b>43.946,08</b>	<b>46.907,33</b>	<b>49.741,13</b>	<b>52.534,09</b>	<b>55.457,81</b>	<b>58.827,35</b>	

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

**Lampiran 3. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Bekasi (persen), 2010–2016**

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	129,23	124,85	122,08	119,48	117,73	116,85	116,42
a. Makanan, Minuman dan Rokok	26,81	26,41	27,13	27,31	28,70	29,23	30,50
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,58	4,40	4,16	4,30	4,08	4,16	4,15
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah tangga	17,37	16,56	15,89	15,69	15,23	15,69	16,02
d. Kesehatan dan Pendidikan	4,90	4,67	4,58	4,57	4,40	4,33	4,27
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	45,68	44,61	43,33	42,40	41,66	41,01	39,77
f. Hotel dan Restoran	24,19	22,75	21,60	20,04	18,75	17,35	16,79
g. Lainnya	5,69	5,44	5,39	5,16	4,91	5,07	4,91
Pengeluaran Konsumsi LNPR	0,40	0,38	0,35	0,36	0,36	0,31	0,31
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,91	4,89	4,92	4,78	4,81	4,99	4,94
Pembentukan Modal Tetap Bruto	28,27	28,66	30,06	31,35	33,34	33,82	34,07
Perubahan Inventori	5,91	5,49	8,30	5,13	6,07	5,19	4,93
Net Ekspor	-68,72	-64,27	-65,70	-61,10	-62,30	-61,16	-60,66
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>100,00</b>						

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Lampiran 4. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Bekasi (persen), 2010–2016

Komponen Pengeluaran		2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
1	2	3	4	5	6	7	8	
Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	129,23	126,03	124,16	121,05	118,10	116,91	115,89	
a. Makanan, Minuman dan Rokok	26,81	26,20	26,18	25,34	25,40	25,36	25,23	
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,58	4,50	4,40	4,53	4,42	4,41	4,36	
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumahtangga	17,37	16,88	16,33	15,96	15,55	15,49	15,56	
d. Kesehatan dan Pendidikan	4,90	4,79	4,72	4,73	4,63	4,67	4,59	
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	45,68	44,72	44,40	43,36	42,26	41,72	41,27	
f. Hotel dan Restoran	24,19	23,41	22,77	22,03	20,85	20,18	19,97	
g. Lainnya	5,69	5,52	5,35	5,12	4,98	5,07	4,91	
Pengeluaran Konsumsi LNPR	0,40	0,39	0,36	0,36	0,37	0,32	0,31	
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,91	4,71	4,58	4,36	4,29	4,28	4,15	
Pembentukan Modal Tetap Bruto	28,27	29,23	30,34	30,80	32,20	32,77	33,05	
Perubahan Inventori	5,91	5,55	8,46	5,31	5,00	3,92	3,84	
Net Ekspor	-68,72	-65,91	-67,90	-61,88	-59,95	-58,19	-57,23	
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>100,00</b>							

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Lampiran 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Bekasi (persen), 2011–2016

Komponen Pengeluaran		2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	7,97	9,56	9,26	9,45	9,59	8,12
a.	Makanan, Minuman dan Rokok	10,12	15,08	12,38	16,76	12,43	13,24
b.	Pakaian dan Alas Kaki	7,38	5,73	15,50	5,30	12,58	8,48
c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumahtangga	6,55	7,51	10,24	7,84	13,75	10,76
d.	Kesehatan dan Pendidikan	6,33	10,04	11,44	6,90	8,73	6,87
e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	9,14	8,84	9,24	9,13	8,70	5,24
f.	Hotel dan Restoran	5,12	6,39	3,59	3,89	2,18	5,05
g.	Lainnya	6,88	10,88	6,92	5,62	14,20	4,97
	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,50	3,02	14,97	12,11	-3,36	5,64
	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,37	12,77	8,47	11,67	14,47	7,48
	Pembentukan Modal Tetap Bruto	13,32	17,52	16,44	18,10	12,04	9,30
	Perubahan Inventori	3,74	69,34	-30,94	31,41	-5,59	3,06
	Net Ekspor	4,52	14,55	3,83	13,25	8,40	7,63
	<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>11,76</b>	<b>12,05</b>	<b>11,64</b>	<b>11,08</b>	<b>10,41</b>	<b>8,52</b>

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Bekasi (persen), 2011–2016

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
1	2	3	4	5	6	7
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	3,81	5,16	3,38	3,04	4,50	5,15
a. Makanan, Minuman dan Rokok	4,05	6,64	2,63	5,88	5,41	5,53
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,43	4,55	8,97	3,17	5,29	4,89
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah tangga	3,45	3,25	3,61	2,92	5,18	6,52
d. Kesehatan dan Pendidikan	4,07	5,15	6,26	3,30	6,49	4,22
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	4,20	5,99	3,54	2,94	4,22	4,93
f. Hotel dan Restoran	3,05	3,81	2,56	-0,01	2,17	4,97
g. Lainnya	3,24	3,37	1,45	2,89	7,42	2,72
Pengeluaran Konsumsi LNPR	2,22	0,08	5,59	7,16	-6,18	1,20
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,20	3,63	0,97	4,12	5,15	2,82
Pembentukan Modal Tetap Bruto	10,06	10,80	7,66	10,41	7,43	6,98
Perubahan Inventori	0,01	62,65	-33,43	-0,71	-17,21	3,86
Net Ekspor	2,10	9,96	-3,36	2,32	2,48	4,32
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>6,45</b>	<b>6,74</b>	<b>6,04</b>	<b>5,61</b>	<b>5,57</b>	<b>6,08</b>

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

**Lampiran 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Bekasi (2010=100), 2010–2016**

Komponen Pengeluaran		2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
1	2	3	4	5	6	7	8	
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	100,00	107,37	118,30	129,25	141,46	155,03	167,62	
a. Makanan, Minuman dan Rokok	100,00	110,12	126,73	142,42	166,28	186,96	211,71	
b. Pakain dan Alas Kaki	100,00	107,38	113,54	131,13	138,08	155,44	168,63	
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah tangga	100,00	106,55	114,55	126,28	136,18	154,91	171,57	
d. Kesehatan dan Pendidikan	100,00	106,33	117,01	130,39	139,38	151,55	161,96	
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	100,00	109,14	118,79	129,76	141,60	153,93	161,99	
f. Hotel dan Restoran	100,00	105,12	111,83	115,85	120,35	122,97	129,19	
g. Lainnya	100,00	106,88	118,51	126,71	133,82	152,82	160,42	
Pengeluaran Konsumsi LNPR	100,00	104,50	107,66	123,78	138,77	134,10	141,66	
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	100,00	111,37	125,59	136,24	152,14	174,15	187,18	
Pembentukan Modal Tetap Bruto	100,00	113,32	133,17	155,07	183,13	205,17	224,25	
Perubahan Inventori	100,00	103,74	175,68	121,33	159,44	150,53	155,13	
Net Ekspor	100,00	104,52	119,72	124,31	140,78	152,60	164,24	
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>100,00</b>	<b>111,76</b>	<b>125,23</b>	<b>139,80</b>	<b>155,29</b>	<b>171,46</b>	<b>186,06</b>	

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Lampiran 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Bekasi (2010=100), 2010–2016

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
1	2	3	4	5	6	7	8
Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	100,00	103,81	109,17	112,86	116,29	121,52	127,29
a. Makanan, Minuman dan Rokok	100,00	104,05	110,96	113,88	120,58	127,10	134,13
b. Pakaian dan Alas Kaki	100,00	104,43	109,18	118,98	122,74	129,24	135,55
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumahtangga	100,00	103,45	106,82	110,67	113,90	119,80	127,62
d. Kesehatan dan Pendidikan	100,00	104,07	109,42	116,27	120,40	127,89	133,29
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	100,00	104,20	110,44	114,35	117,71	122,67	128,72
f. Hotel dan Restoran	100,00	103,05	106,98	109,72	109,71	112,09	117,66
g. Lainnya	100,00	103,24	106,71	108,26	111,59	119,65	122,91
Pengeluaran Konsumsi LNPR	100,00	102,22	102,30	108,02	115,76	108,60	109,90
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	100,00	102,20	105,91	106,94	111,34	117,08	120,38
Pembentukan Modal Tetap Bruto	100,00	110,06	121,94	131,28	144,95	155,72	166,59
Perubahan Inventori	100,00	100,01	162,66	108,28	107,51	89,00	92,44
Net Ekspor	100,00	102,10	112,27	108,49	111,01	113,76	118,67
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>100,00</b>	<b>106,45</b>	<b>113,62</b>	<b>120,49</b>	<b>127,25</b>	<b>134,33</b>	<b>142,50</b>

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Lampiran 9. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kota Bekasi (2010=100), 2010–2016

Komponen Pengeluaran	2010	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	100,00	104,01	108,36	114,53	121,65	127,57	131,17
a. Makanan, Minuman dan Rokok	100,00	105,83	114,21	125,06	137,90	147,09	157,84
b. Pakain dan Alas Kaki	100,00	102,82	103,99	110,22	112,49	120,28	124,40
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumahtangga	100,00	102,99	107,23	114,10	119,56	129,30	134,44
d. Kesehatan dan Pendidikan	100,00	102,18	106,93	112,15	116,05	118,50	121,51
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	100,00	104,74	107,56	113,48	120,30	125,48	125,85
f. Hotel dan Restoran	100,00	102,01	104,54	105,59	109,70	109,71	109,80
g. Lainnya	100,00	103,53	111,05	117,04	120,14	127,72	130,53
Pengeluaran Konsumsi LNPR	100,00	102,23	105,24	114,59	119,88	123,49	128,90
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	100,00	108,97	118,58	127,39	136,64	148,75	155,48
Pembentukan Modal Tetap Bruto	100,00	102,96	109,21	118,12	126,35	131,76	134,61
Perubahan Inventori	100,00	103,74	108,00	112,05	148,31	169,13	167,82
Net Ekspor	100,00	102,37	106,64	114,57	126,82	134,15	138,41
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>100,00</b>	<b>104,99</b>	<b>110,22</b>	<b>116,03</b>	<b>122,03</b>	<b>127,64</b>	<b>130,57</b>

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Lampiran 10. Laju Pertumbuhan Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kota Bekasi (Persen),  
2011–2016

Komponen Pengeluaran	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015*	2016**	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	4,01	4,19	5,69	6,22	4,87	2,82	
a. Makanan, Minuman dan Rokok	5,83	7,92	9,50	10,27	6,67	7,31	
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,82	1,13	5,99	2,06	6,92	3,43	
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah tangga	2,99	4,12	6,40	4,78	8,15	3,97	
d. Kesehatan dan Pendidikan	2,18	4,65	4,88	3,48	2,11	2,54	
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	4,74	2,69	5,50	6,01	4,30	0,29	
f. Hotel dan Restoran	2,01	2,48	1,01	3,90	0,01	0,08	
g. Lainnya	3,53	7,27	5,39	2,65	6,31	2,19	
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,23	2,94	8,88	4,62	3,01	4,39	
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,97	8,82	7,43	7,26	8,86	4,53	
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,96	6,06	8,16	6,97	4,28	2,16	
Perubahan Inventori	3,74	4,11	3,75	32,35	14,04	-0,77	
Net Ekspor	2,37	4,17	7,44	10,69	5,78	3,17	
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>4,99</b>	<b>4,98</b>	<b>5,28</b>	<b>5,17</b>	<b>4,59</b>	<b>2,30</b>	

\* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara



# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BEKASI**

Jl. Rawa Tembaga I No. 16 Telp/Fax : .021-8895398

email : [bps3275@bps.go.id](mailto:bps3275@bps.go.id) homepage : <http://bekasikota.bps.go.id>